



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ **453** /35.73.112/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR:188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor:

188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR: 188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023.

KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk Tahun 2021-2023.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah untuk Tahun 2018-2020 tetap mendasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Desember 2021





LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR: 188.45/~~43~~/35.73.112/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR: 188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 MALANG TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana : X(1) = Indeks Harapan Hidup X(2) = Indeks Pendidikan X(3) = Indeks Standar hidup layak		
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indek Pendidikan	Indeks Pendidikan = (Jumlah Rata-rata Harapan Lama Sekolah ditambah Jumlah Rata-rata Lama Sekolah) dibagi dua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup Maksimal dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal dibagi Angka Harapan Hidup Maksimal	Dinas Kesehatan	

Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$ <p><math>P_{ij}</math> = harga komoditas <math>i</math> dikota <math>j</math>  <math>P_{ik}</math> = harga komoditas <math>i</math> di Jakarta Selatan  <math>m</math> = jumlah komoditas</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB(n) - PDRB(n-1)}{PDRB(n-1)} \times 100\%$ <p><math>PDRB(n)</math> = nilai PDRB tahun <math>n</math>  <math>PDRB(n-1)</math> = nilai PDRB tahun <math>n-1</math></p>		
	Gini Rasio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana :  <math>P_i</math> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-<math>i</math>  <math>Q_i</math> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-<math>i</math></p>		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	$\frac{PEkraf(n) - PEkraf(n-1)}{PEkraf(n-1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	Hasil rata-rata indikator pembentuknya, yaitu: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, dan kontribusi terhadap perekonomian	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	$IKLHD = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Dinas Lingkungan Hidup	
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	<p>Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p><math>\alpha = 0</math></p> <p><math>z</math> = garis kemiskinan.</p> <p><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p><math>n</math> = jumlah penduduk.</p>		
	Indeks Modal Sosial	<p><i>Nilai rata – rata terbagi unsur</i></p> $= \frac{\text{total nilai persepsi per item}}{\text{Total item yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Indikator Indeks Modal Sosial terbagi dalam tiga indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sikap Percaya dan Toleransi mencakup sikap percaya, toleransi agama, toleransi sosial, toleransi suku, dan toleransi politik</li> <li>Aksi bersama mencakup resiprositas dan aksi bersama</li> <li>Kelompok dan jejaring mencakup partisipasi dalam kelompok dan jejaring</li> </ol>		



Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	$\frac{(N - 1) - N}{N - 1} \times 100\%$ <p>Keterangan:  N : Jumlah PMKS Tahun N  N-1 : Jumlah PMKS Tahun N-1</p>	Dinas Sosial P3AP2KB	
	TPT	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:  TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)  PP : Jumlah pengangguran (orang)  PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	$= \frac{\text{Nilai rata - rata terbagi unsur total nilai persepsi per item}}{\text{Total item yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Indikator penyusun IPMas : indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman.</p>	Kecamatan	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	Dinas Sosial P3AP2KB	
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB		
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	Jumlah Perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen	Satpol PP	



Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB	Sekretariat Daerah	
	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD	BPK RI
	Level Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP
	Rasio PAD	PAD dibagi dengan jumlah pendapatan daerah	Bapenda	
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan: IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks SPBE Kematangan	Laporan Hasil Evaluasi Kematangan SPBE oleh Kementerian PANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR: 188.45/43/35.73.112/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR: 188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 MALANG TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Instusionalisasi Pendidkan Karakter yang berkeadilan dan berbudaya	Indeks Pendidikan	Jumlah angka harapan lama sekolah ditambah angka rata- rata lama sekolah dibagi dua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan dalam Mendukung Pendidikan yang Berkarakter dan Berbudaya	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal; Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;	BPS

	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p><math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math></p> <p><math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math></p> <p><math>i</math> = Usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>)</p> <p><math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren</p>	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
Rata-rata lama sekolah	<p>Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$ <p>Keterangan:</p>	<p>Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;</p> <p>Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;</p> <p>Bidang Pembinaan Ketenagaan</p>	BPS

		<p>1. P<sub>15+</sub> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>2. Lama sekolah penduduk ke-i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>&gt; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>&gt; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1</li> <li>&gt; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>&gt; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ul> <p>3. Tahun konversi ijazah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tidak punya ijazah = 0</li> <li>&gt; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun</li> <li>&gt; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun</li> <li>&gt; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun</li> </ul>		
	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Data Kebudayaan yang aktif di Kota Malang dibagi Jumlah Seluruh Data Kebudayaan di Kota Malang dikalikan 100%	Bidang Kebudayaan	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

## 2. DINAS KESEHATAN



KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup Maksimal dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal dibagi Angka Harapan Hidup Maksimal	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik (BPS)
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Persentase RS, Puskesmas, Labkesda yang terakreditasi	Jumlah RS, Puskesmas, Labkesda yang terakreditasi dibagi jumlah RS, Puskesmas, Labkesda dikali seratus persen	Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Laporan Tahunan RS; SIRS Online (RS Online); Laporan Validasi Data Puskesmas Kota Malang; Laporan Tahunan UPT Labkesda
Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok individu di suatu wilayah	Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Badan Pusat Statistik (BPS)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

3. DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan budaya baca dan tertib tata kelola kearsipan	Persentase masyarakat sadar membaca	Jumlah masyarakat sadar membaca dibagi jumlah penduduk kota malang dikali 100%	Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah	
	Persentase tata kelola kearsipan berbasis elektronik	Jumlah tata kelola kearsipan berbasis elektronik dibagi jumlah seluruh arsip dikali 100%		
Meningkatnya Layanan Budaya baca	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dikali 100%	Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan; Bidang Preservasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Data Pengunjung
	Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan tahun n dikurangi jumlah koleksi perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah koleksi perpustakaan tahun n-1 dikali 100%		Data koleksi perpustakaan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan dokumen arsip yang berbasis elektronik	Jumlah dokumen arsip yang sudah dikelola secara elektronik tahun n dikurangi	Bidang Pengelolaan Arsip	Data Arsip

		jumlah dokumen arsip yang sudah dikelola secara elektronik tahun n-1 dibagi jumlah dokumen arsip yang sudah dikelola secara elektronik tahun n-1 dikali 100%		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

#### 4. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	$\frac{PEkraf (n) - PEkraf (n - 1)}{PEkraf (n - 1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/ <i>purchasing power parity</i>	$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}}\right)^{1/m}$ <p> <math>P_{ij}</math> = harga komoditas i dikota j  <math>P_{ik}</math> = harga komoditas i di Jakarta Selatan  m = jumlah komoditas </p>		
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi Sehat	Jumlah koperasi Sehat dan cukup sehat dibagi jumlah seluruh koperasi yang melaksanakan RAT x 100 %	Bidang Koperasi	Data koperasi (On-Line Data System Kemenkop RI)



	Persentase kenaikan volume penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	Jumlah volume Penjualan Usaha Mikro Binaan Tahun n dikurangi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun n-1 dibagi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun (n-1) dikali 100%	Bidang Usaha Mikro	Data Usaha Mikro binaan Dinkop dan UM Kota Malang
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	Jumlah pasar yang memenuhi standar akad halal dibagi jumlah seluruh pasar di Kota Malang dikali 100%	Bidang Perdagangan	Data Pasar Halal
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	Simpang standar dibagi harga rata-rata dikali 100%	Bidang Perdagangan	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	Laju pertumbuhan industri tahun berjalan	Bidang Industri	Data Pertumbuhan Industri
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

5. DINAS SOSIAL PERMBERDAYAAN PERPEMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi	Persentase penurunan PMKS	$\frac{(N - 1) - N}{N - 1} \times 100\%$	Dinas Sosial P3AP2KB	



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Keterangan: N : Jumlah PMKS Tahun N N-1 : Jumlah PMKS Tahun N-1		
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan	IPG	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki		
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ Keterangan <i>Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t</i> <i>Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)</i> <i>B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t</i> <i>D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t</i> <i>Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t</i> <i>Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</i>		
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani/dibina	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina dibagi jumlah PMKS x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Data PMKS

	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri dibagi jumlah PMKS binaan dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Data PMKS
	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dibagi Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dikali 100%		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio KDRT	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 1000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Data Laporan KDRT
	IDG	Indeks keterwakilan perempuan diparlemen ditambah indeks pengambilan keputusan ditambah indeks pendapatan perkapita perempuan dibagi 3	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Data Hasil Pemilu

Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Jumlah Penduduk tahun berkenan dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah penduduk tahun berkenan dikalikan 100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kependudukan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

6. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	$\sum$ index ketahanan pangan kota x nilai standarisasi masing masing indikator pada kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Bidang Ketahanan Pangan	
	Persentase peningkatan produksi sektor pertanian	Jumlah produksi sektor pertanian (tahun n) dikurangi jumlah produksi sektor pertanian (tahun n-1) dibagi jumlah produksi sektor pertanian (tahun n-1) dikali seratus persen	Bidang Pertanian; Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Bidang Perikanan	



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

7. DINAS PERHUBUNGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	IKLI Perhubungan	Nilai IKLI	Dinas Perhubungan	Hasil Survey
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase pelayanan angkutan jalan	Jaringan jalan yang terlayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan	Bidang Angkutan	Data angkutan jalan
	Angka kemacetan	V/C Ratio Keterangan: V= Volume Kendaraan C= Kapasitas jalan	Bidang Lalulintas	Data titik kemacetan
Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan PAD retribusi parkir	Jumlah retribusi parkir tahun n dikurangi jumlah retribusi parkir tahun n-1 dibagi jumlah retribusi parkir tahun n-1 x 100%	Bidang Pengelolaan Perparkiran	Data Realisasi PAD
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP



8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kematangan SPBE	Nilai Indeks Kematangan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penilaian KemenpanRB
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks Tata Kelola SPBE	Bidang Aplikasi Informatika	Penilaian KemenpanRB/Penilaian Mandiri
	Indeks Layanan SPBE	Nilai Indeks Layanan SPBE	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Penilaian KemenpanRB/Penilaian Mandiri
	Persentase ketermanfaatan data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dimanfaatkan dibagi jumlah seluruh data statistik sektoral dikali 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Data Statistik Sektoral
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan persandian dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Data Persandian
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat

9. DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPS
	Predikat WBK	Penetapan WBK		Penetapan Kemenpan RB
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah pekerja/buruh di perusahaan swasta/PMA/PMDN dibagi Jumlah perusahaan swasta/PMA/PMDN	Bidang Tenaga Kerja	BPS
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun (n-1) dikali 100%	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Data dan Sistem Informasi
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk yang bekerja dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%	Bidang Tenaga Kerja	BPS
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	Nilai Indeks SPBE	Bidang Data dan Sistem Informasi	Hasil Evaluasi SPBE Kemenpan

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Nilai SKM	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum dan Sosial; Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan sosial budaya	Hasil Survey
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Predikat WBK/WBBM	Penetapan WBK/WBBM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penetapan Kemenpan RB
Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	persentase penduduk yang memiliki identitas kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik ditambah yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Database Kependudukan



	persentase penduduk berakta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
Meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi	persentase pemanfaatan data penduduk terhadap pelayanan publik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerjasama dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100 %	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Database Kependudukan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

#### 11. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISITA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pemuda dan Pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata (akomodasi/hotel dan makanan minuman/resto/rumah makan) dibagi PDRB Kota malang dikali 100%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	BPS
	Nilai Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Jumlah skor X1 ditambah skor X2 ditambah skor X3 dibagi 3 dikali 10 Keterangan:		Laporan Perhitungan Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

		<p>X1= Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%)</p> <p>X2= Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%)</p> <p>X3= Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (Jumlah pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%)</p>		
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> olahraga tingkat provinsi	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> olahraga tingkat provinsi	Bidang Keolahragaan	Laporan hasil <i>event</i> olahraga tingkat provinsi
	Jumlah Penyelenggaraan <i>Event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional ( <i>Tourism Sport</i> )	Jumlah <i>Event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional yang dilaksanakan pada tahun n		Laporan hasil <i>event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional

Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%	Bidang Kepemudaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dikali 100%	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan pendataan pelaku ekonomi kreatif
	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata di Kota Malang tahun ke n	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Laporan pendataan dari pokdarwis dan hasil survey
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

## 12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	Hasil Uji Kualitas Lingkungan Hidup



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j  C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)  L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j  M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>	Bidang Tata Lingkungan Hidup; Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; UPT Laboratorium Lingkungan	Hasil Uji Pemantauan Kualitas Air
	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ <p>I<sub>eu</sub> = 50% Indeks SO<sub>2</sub> + 50% Indeks NO<sub>2</sub></p>		Hasil Uji Pemantauan Kualitas Udara
	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>DKK = ∑ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>		Hasil Uji Pemantauan Kualitas Lahan
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kota Malang	Persentase Pengelolaan Sampah	<p><i>Persentase Penanganan Sampah ditambah Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai komulatif)</i></p> <p>Keterangan :</p> <p>1. <i>Persentase Pengurangan Sampah</i> = Jumlah sampah yang berkurang oleh masyarakat dibagi jumlah</p>	Bidang Persampahan dan Limbah B3; UPT Pengelolaan Sampah	Data Sampah yang masuk ke TPA dan Sampah yang diolah ke PKD dan TPS

		<p>timbulan sampah dikali 100 %</p> <p>2. <i>Persentase Penanganan Sampah</i> = Jumlah Sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota/DLH</p>		
Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan dan kuantitas RTH	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang	Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang dibagi Luas Wilayah Kota Malang dikali 100%	Bidang Ruang Terbuka Hijau	Laporan inventarisasi RTH Kota Malang
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

13. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Survey IKLI tingkat Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Nilai Survey IKLI Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya;	Hasil Survey

			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase Area Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Rekapitulasi Penanganan Kawasan Kumuh
	Persentase Penurunan Titik Genangan	Jumlah titik genangan tahun n-1 dikurangi jumlah titik genangan tahun n dibagi jumlah titik genangan tahun n-1 dikali 100 persen	Bidang Bina Marga	Data titik genangan
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan Penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan Tata Ruang	Jumlah luas lahan yang sudah memiliki keterangan rencana kota dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data KRK
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

#### 14. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kondusivitas Lingkungan Sosial	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban/konflik sosial	Jumlah kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial yang terselesaikan dibagi kejadian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial



		gangguan ketertiban/konflik sosial dikali seratus persen		
Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	Jumlah kejadian yang terselesaikan dibagi seluruh kejadian dikali seratus persen	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Data kejadian gangguan disintegrasi yang terjadi di Kota Malang dalam setahun Data kejadian gangguan disintegrasi yang terselesaikan
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta Ormas dalam pembangunan	Jumlah Ormas yang terdaftar dan berperan aktif dalam pembangunan dibagi jumlah Ormas terdata dikali seratus persen	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Data pemilih dalam pilpres dan pileg 2019 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang tahun 2019
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

15. BADAN PENDAPATAN DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan melalui Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Data Realisasi PAD
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100 %	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD; Bidang Pajak Daerah; dan Bidang Pengendalian Pajak Daerah	Data Realisasi PAD
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

16. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang	Nilai evaluasi SAKIP komponen Perencanaan.	Nilai evaluasi SAKIP komponen Perencanaan pada SAKIP Kota	Badan Perencanaan	Nilai komponen Perencanaan Hasil Evaluasi SAKIP Kota

Akuntabel, Sinergis dan Partisipatif		Malang yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Pembangunan Daerah	Malang oleh Kemenpan-RB
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD dan RPJMD) yang sesuai ketentuan dibagi jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dikali 100%.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Perencanaan Perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang sesuai ketentuan dibagi jumlah Perencanaan Perangkat Daerah dikali 100%.	Bidang Ekonomi dan Sumbledaya Alam; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase jumlah kajian/analisa /studi/rencana induk/ <i>grand design</i> yang mendukung perencanaan.	Jumlah kajian/analisa/studi /rencana induk/ <i>grand design</i> yang mendukung perencanaan pada tahun N dibagi jumlah kajian/analisa/studi/rencana induk/ <i>grand design</i> pada tahun N dikali 100%.	Bidang Ekonomi dan Sumbledaya Alam; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikali 100%.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda;



				Hasil verifikasi Renja PD Mitra
	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan kali 100%.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda; Hasil verifikasi Renja PD Mitra
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

#### 17. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK	Jumlah laporan keuangan SKPD berkualitas dibagi jumlah laporan keuangan SKPD Kota Malang dikali 100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Jumlah laporan keuangan SKPD bebas salah saji material dibagi jumlah laporan keuangan SKPD Kota Malang dikali 100%	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah; Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Laporan Keuangan SKPD

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

18. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan: IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya kinerja ASN	Rata-rata capaian nilai kinerja ASN Kota Malang	Jumlah nilai SKP ASN Pemkot Malang dibagi ASN Kota Malang	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Nilai SKP ASN
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Jumlah ASN sesuai yang ditempatkan sesuai kompetensi dibagi Jumlah ASN Pemkot dikali 100%	Bidang Mutasi; Bidang Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Data Kepegawaian

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

19. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Disaster Resilience Scorecard	Nilai sepuluh faktor esensial pembentuk ketangguhan kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana dibagi jumlah masyarakat di kawasan rawan bencana dikali seratus persen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Data masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat



20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pengaduan masyarakat tahun n-1 dikurangi jumlah pengaduan masyarakat tahun n dibagi jumlah pengaduan masyarakat tahun n-1 dikali 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali 100%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah; Bidang Perlindungan Masyarakat	Data Pelanggaran K3
Meningkatnya stabilitas lingkungan	Rasio linmas per RT	Jumlah satuan Linmas dibagi jumlah RT	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data Linmas
	Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran	Jumlah tanggap kasus kebakaran dengan response time rate dibagi jumlah kasus total kebakaran dikali 100%	UPT Pemadam Kebakaran	Data Kejadian Kebakaran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

## 21. INSPEKTORAT

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Penjaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien	Level Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibagi jumlah PD dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Level kapabilitas APIP	Nilai Level kapabilitas APIP yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas ( <i>Quality Assurance</i> ) dari BPKP
Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Indeks yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

## 22. SEKRETARIAT DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai SAKIP Kota Malang	Sekretariat Daerah	LHE KEMENPANRB
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah x 100%	Bagian Hukum	Register Produk Hukum
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Hasil Survey
Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Tingkat kematangan penataan Perangkat Daerah	Total nilai kematangan Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Nilai kematangan Perangkat Daerah
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Bagian Organisasi	LHE KEMENPANRB

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai EKPPD	Nilai EKPPD	Bagian Pemerintahan	Nilai EKPPD
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	Jumlah perangkat daerah yang nilai SKMnya berpredikat baik ( $\geq 76,61$ ) dibagi jumlah seluruh perangkat daerah x 100%	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA; Bagian Pengadaan Barang/Jasa; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SKM Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Bagian Umum	Nilai Evaluasi SAKIP

### 23. SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	Sekretariat DPRD	Hasil Survey
Meningkatnya Fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase Promperda yang menjadi Perda	Jumlah Promperda yang menjadi Perda dibagi seluruh promperda dikali 100%	Bagian Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Buku Dokumen Promperda

Meningkatnya kinerja pelayanan perangkatan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Bagian Program dan Keuangan; Bagian Umum; Bagian Humas	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	--	-----------------

#### 24. KECAMATAN BLIMBING

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Blimbing	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan, jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	------------------------------	-------------	-----------------

## 25. KECAMATAN KEDUNGKANDANG

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kedungkandang	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	------------------------------	-------------	-----------------

26. KECAMATAN KLOJEN

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Klojen	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	------------------------------	-------------	-----------------

27. KECAMATAN LOWOKWARU

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Lowokwaru	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	------------------------------	-------------	-----------------

28. KECAMATAN SUKUN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sukun	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	------------------------------	-------------	-----------------

